

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahnya

A. Buku

Hidayat, Akmal. 2018. *Hukum BUMDesa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa*. Yogyakarta: Samudera Biru.

Adjie, Habib. 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cet. Pertama. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

_____.2018. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Ke-5*. Bandung: Refika Aditama.

_____.2018. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama.

Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Anshori, A. Ghofur. 2013. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etik*. Yogyakarta: UII Press.

Arrasjid, Chainur. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmadja, I Dewa Gede dkk. 2018. *Teori-Teori Hukum*, Malang: Stara Press.

- Budiono, Harlein 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Diantha, I Made Pasek. 2019. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. II. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hart, H.L.A. 1997. *the concept of law*, Newyork: Clarendon Press-Oxford, diterjemahkan oleh M. Khozim. 2010. *Konsep Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Ke-13. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*. Cetakan. Pertama. Mataram: PT. Raja Grafindo Perasada.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Surakarta: Pustaka Setia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2015. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Qomar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan non Doktrinal*. Makassar:CV Sosial Politic Genius.

- Raharjo, Handri. 2013. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, Bernard Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Simorangkir, J.C.S. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDesa*. Jakarta: UAI Press.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Alfiansyah. 2021. “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5 No. 2 Maret 2021. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1991/1621> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Andini, Medina Praba. 2019. “Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Berdirinya Badan Usaha Milik Desa Dilihat Dalam Perspektif Permendes No.4 Tahun 2015 (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Semarang)”. *Tesis*. Magister Kenotariatan. Universitas Islam Sultan Agung. 2019). <http://repository.unissula.ac.id/16861/> DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v6i2.5027> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Putry, Muthia Anggela Mawadhatty 2018. “Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa: Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera”. *Tesis*. Magister Kenotariatan. Universitas Andalas. Padang. 2018). <http://scholar.unand.ac.id/34963/> DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i2.77.g164> diakses pada 7 Juli 2022.
- Djumardin, dkk. 2019. “Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha”, *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 4 No. 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.9> diakses pada 26 Agustus 2022.

- Edwin, dkk. 2020. “Analisis Hukum Atas Akta Pendirian Koperasi Dimana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan Kepada Surat Kuasa Di Bawah Tangan”. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol. 1 No. 2 Oktober 2020. <https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris/article/view/45/42> diakses pada 26 Agustus 2022.
- Federik, Steven dan Tjempaka. 2021. “Pendirian BUMDesa dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan”. *Jurnal Era Hukum* Vol. 19 No. 1 Juni 2021. DOI: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i1.11150> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Hutomo, Priyo dan Markus Maselinus Soge. 2021. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”. *Jurnal Legacy* Vol. 1 No. 1 Maret 2021. Hlm. 47-68. diakses pada 15 Oktober 2022. DOI: <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Idris, Tarwin. 2020. “Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konsitusi. *Jurnal Lex Renaissance* Vol. No. 3 5 Juli 2020. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16965/pdf> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Indrayana, Fandili. 2021. “Konstruksi Hukum Bentuk Badan Usaha Yang Tepat Dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Tesis. Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman*. <http://repository.unsoed.ac.id/11201/> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Kashogi, Iznan Habib, dkk. 2022. “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. *Limbago: Journal of Constituional Law* Vol. 2 No. 1 (2022). Hlm. 21-34. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/17655/13608> diakses pada 18 Oktober 2022.
- Marwan, Ali. 2016. “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol.

- 16 No. 3 Tahun 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Mitendra, Hario Mahar. 2018. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum". *Jurnal Rechtsvinding* 2018. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf diakses pada 18 Oktober 2022.
- Wulansari, Putri. 2019. "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tegal". *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro*, Vol. 12 Nomor 1 (2019). <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23762> diakses pada 18 Oktober 2022.
- Nasir, Gamal Abdul. 2017. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Hukum Replik* Vol. 5 No. 2 September 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925.g590> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Nola, Luthvi Febryka. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7 No. 1, Juni 2016. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Noviana, Ashari Mone dan Nurbiah Tahir. 2022. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Masago Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone". *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* Vol. 3, Nomor 1, Februari 2022. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/5441> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Permadi, I Made Hengki. 2019. "Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma pada Sistem Administrasi Badan Usaha". *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 4 No. 3 Desember 2019. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p12> diakses pada 29 Agustus 2022.

- Purwaningsih, Endang. 2011. “Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum”. *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3 Desember 2011. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/viewFile/846/502> diakses pada 16 November 2022.
- Rahma, Anisa Aulia, dkk. 2022. “Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2 No.8 Januari 2022. Hlm. 2423-2428. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1121> diakses pada 12 Oktober 2022
- Santosa, A A Gede D H. 2019. “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 5 No. 2 2019. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468> diakses pada 12 Oktober 2022.
- Sitompul, Raysha Anggarani dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. “Keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6 No. 3 Juli 2022 Hlm. 10117. DOI: <https://10.36312/jisip.v6i3.3356/> <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index> diakses pada 29 Agustus 2022.
- Wibowo, Brilian Al Azhar. 2021. “Peran Notaris Terhadap Akta Pendirian Koperasi dan Akibat Hukum Apabila Pendirian Koperasi Tidak Melibatkan Notaris”. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: UII. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33283/19921006%20Brilian%20Al%20Azhar%20Wibowo.pdf?sequence=1> diakses pada 29 Agustus 2022.

D. Sumber Lainnya

- Akademik Desa, “Strategi Pembinaan Dan Pengembangan Bum Desa/Bum Desa Bersama”, <https://akademidesa.id/2021/08/14/strategi-pengembangan-bum-des-a-bum-des-a-bersama/> diakses pada 20 Oktober 2022.

- Asosiasi UMKM Indonesia. “Akta Pendirian Badan Usaha”.
<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/akta-pendirian-badan-usaha/>
diakses pada 29 Agustus 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Tengah. “Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat”.
<https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf> diakses pada 24 Agustus 2022.
- Badan Usaha Milik Desa, Status Dan Pembentukannya, <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya/> diakses pada 15 September 2022.
- Berita Kompas. “BUMDesa dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/18072391/BUMDesa-dan-pembangunan-ekonomi-pedesaan> diakses pada 22 Oktober 2022.
- BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. 2022. “Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum”. Artikel Online. <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum#:~:text=UU%20Cipta%20Kerja%20telah%20mengalami,%2FPUU%2DXVIII%2F2020>. diakses pada tanggal 7 Juli 2022.
- Booklet Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf> diakses pada 20 Oktober 2022.
- CNN Indonesia. 2022. “2.815 BUMDesa Sudah Berbadan Hukum”. Artikel berita online. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220118185101-92-748262/2815-BUMDesa-sudah-berbadan-hukum> diakses pada 7 Juli 2022.
- Data Pelaksanaan Pendirian BUMDesa yang sudah melakukan Pendaftaran di Sistem Informasi Desa, <https://sid.kemendes.go.id/BUMDesa> diakses pada 10 November 2022.
- DetikFinance. 2021. "UU Ciptaker Beri Payung Hukum Pelaksanaan BUMDesa", Artikel Online. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

[5845168/uu-ciptaker-beri-payung-hukum-pelaksanaan-BUMDesa/](https://www.ciptadesa.com/2021/05/panduan-pendaftaran-BUMDesa/) diakses pada 27 Juli 2022.

Dokumen Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama, Kementerian Desa PDTT RI, <https://www.ciptadesa.com/2021/05/panduan-pendaftaran-BUMDesa.html> diakses pada 28 Juni 2022.

Habib Adjie. “Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa): Sebagai Institusi yang Mengorganisasikan Badan Usaha-Badan Usaha yang Dimiliki oleh Pemerintah Desa”. Power Point Hlm. 18. <https://inipengdamadiunblog.files.wordpress.com/2018/05/BUMDesa-sebagai-institusi-yang-mengorganisasikan-badan-usaha-oleh-habib-adjie.pdf> diakses pada 20 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Chrisna (Analisis Pengembangan Hukum Bagian Perdata) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI pada 18 Oktober 2022.

Hoaks Konsep UU Omnibus Law Berasal dari China https://www.kominfo.go.id/content/detail/30384/hoaks-konsep-uu-omnibus-law-berasal-dari-china/0/laporan_isu_hoaks diakses pada 20 Oktober 2022.

Hukum Online. 2022. “Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK”. Artikel online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-memaknai-keberlakuan-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk-cl1703> diakses pada 7 Juli 2022.

Info BUMDesa, Landasan Hukum BUMDesa, artikel online website <https://infoBUMDesa.id/landasan-hukum/> diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kementerian Desa PDTT RI. 2022. “Cara Mendaftarkan BUMDesa di KEMENDESA 2022”. <https://blog.BUMDesa.id/2017/09/cara-mendaftarkan-BUMDesa-di-kemendesa/> diakses pada 7 Juli 2022.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022. “Keadilan Vs Kepastian Hukum”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/29/Keadilan-vs-Kepastian-Hukum.html> diakses pada 10 September 2022
- Koinworks. “Akta Pendirian Perusahaan: Pengertian, Jenis, dan Syarat untuk Membuatnya”. <https://koinworks.com/blog/akta-pendirian-perusahaan/#:~:text=Akta%20Pendirian%20Perusahaan%20adalah%20jenis,perusahaan%20di%20mata%20hukum%20Indonesia> diakses pada 29 Agustus 2022.
- Lamangkau, Salam. 2017. “Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDesa Dan Peraturan”. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen https://www.jdih.sultengprov.go.id/jdih/foto_upload/file/PAPARAN/BARU/Tata%20Cara%20Penyusunan%20Perdes%20BUMDESA.pdf diakses pada 17 Mei 2022.
- Nurhandianto, Fajar. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, Hlm. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf> diakses pada 17 Mei 2022.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/> diakses pada 29 Agustus 2022.
- Tugas Dan Wewenang Notaris-PPAT, <https://www.inanews.co.id/2020/05/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/> diakses 12 September 2022.
- Sedesa. 2022. “Alur Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa”. 26 Mei 2022. Alur Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. <https://sedesa.id/panduan-pengajuan-nama-dan-pendaftaran-badan-hukum-bum-desa-bum-desa-bersama/> diakses pada tanggal 12 Juni 2022.
- Suhariyono AR. “Bahasa Peraturan Perundang-Undangan”, Hlm. 7. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/artikel/bahasaperundangan.pdf> diakses pada 28 Oktober 2022.